



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

- Tahun Sidang : 2020- 2021
- Masa Persidangan : III
- Rapat : Ke - 8 (Delapan)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Kepala SKK Migas
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Rabu, 3 Februari 2021
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 12.55 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan *virtual*
- Acara :
1. Strategi SKK Migas dalam menahan penurunan alamiah produksi migas di blok Cepu, Mahakam dan blok migas lainnya
 2. Persiapan dan skenario SKK Migas dengan berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja
 3. Perkembangan IDD untuk menopang lifting migas nasional
 4. Perkembangan implementasi insentif dan stimulus non fiskal dan industri hulu migas
 5. Lain-lain
- Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto
(Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
- Hadir :
- A. Pemerintah
 1. Kepala SKK Migas
 - B. 39 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
 - 18 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
 - 21 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
 - 12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 3 Februari 2021 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Strategi SKK Migas dalam menahan penurunan alamiah produksi migas di blok Cepu, Mahakam dan blok migas lainnya
 - b. Persiapan dan skenario SKK Migas dengan berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja
 - c. Perkembangan IDD untuk menopang lifting migas nasional
 - d. Perkembangan implementasi insentif dan stimulus non fiskal dan industri hulu migas
 - e. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk membuat perencanaan yang realistis terkait visi 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD di Tahun 2030, kemudian perencanaan tersebut dipaparkan pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya dengan Komisi VII DPR RI.
2. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk melakukan penguatan dan penyegaran tim perencanaan SKK Migas sehingga rencana target lifting migas 1 juta BOPD pada Tahun 2030 dapat tercapai.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala SKK Migas agar Pemerintah berupaya melaksanakan kebijakan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang fleksibel dan kompetitif untuk meningkatkan daya tarik investasi hulu migas.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan data secara detail mengenai target lifting migas 1 juta BOPD, EOR, dan *cost recovery* per wilayah kerja dan KKKS.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan strategi dalam mengatasi penurunan produksi migas secara alamiah di Blok Cepu,

Mahakam, dan Blok lainnya, kemudian melaporkan hasilnya secara periodik per triwulan kepada Komisi VII DPR RI.

6. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk menyelesaikan proses peralihan operator *Chevron Indonesia Company* sesuai target sehingga terdapat kepastian pengembangan proyek strategis nasional *Indonesia Deepwater Development*.
7. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 10 Februari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.55 WIB

KEPALA SKK MIGAS

DWI SOETJIPTO

Jakarta, 3 Februari 2021

KETUA RAPAT,

SUGENG SUPARWOTO
A-373